

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia penyebaran narkoba telah menjadi “Darurat Narkoba” dan harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera, sangat banyak kasus yang telah ditimbulkan oleh narkoba baik materi maupun non materi serta kerugian yang sangat besar setiap tahunnya bagi Indonesia. Penyebaran narkoba di Indonesia yang setiap tahunnya semakin meningkat dipengaruhi oleh jumlah populasi penduduk Indonesia yang besar. Pemerintah pusat sudah melakukan tindakan yang cukup tegas untuk memberantas kasus narkoba di Indonesia dengan membentuk BNN (Badan Narkotika Nasional) dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) yang bertugas untuk memberantas kasus-kasus narkoba serta merehabilitasi para pengguna narkoba.

Di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dijumpai kasus narkoba tepatnya di Desa Lekok, menurut salah satu aparat desa banyak pemuda kampung yang selalu mengonsumsi minuman keras (Miras), meskipun sebagian besar yang dikonsumsi masyarakat masih dalam bentuk minuman keras (miras) namun perilakunya selalu mengganggu ketertiban masyarakat, terutama jika ada keramaian atau pertunjukan hiburan para remaja sering berbuat onar.

Bertolak dari kasus yang ada nampak bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pasuruan terutama di Desa Lekok ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat

penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada pengguna maupun pengedar narkoba yang ada di desa Lekok ini jika ketahuan oleh aparat pemerintah, maka kepala desa sendiri yang melakukan tindakan yakni memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku misalnya dengan menyuruh pelaku untuk membersihkan saluran air di desa tersebut demi menerapkan hukum yang berlaku di desa tersebut bila perlu diberi tindakan kekerasan yakni dengan memukul pelaku agar mereka jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pasuruan juga membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah dan elemen masyarakat lainnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.<sup>1</sup>

Data yang diperoleh sepanjang tahun 2014-2015, setidaknya terdapat 265 kasus narkoba di Kabupaten Pasuruan. Dari jumlah tersebut, 43 kasus terjadi

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 60 ayat (1) dan (2) huruf e

pada tahun 2014 dan naik tajam sebanyak 79 kasus hingga mencapai 122 kasus pada tahun 2015. Kata Yudha, banyaknya kasus tersebut tak lepas dari peran serta kepolisian yang terus memburu para pengguna maupun pengedar narkoba di Kabupaten Pasuruan. “Kita terus dibantu oleh kepolisian dalam menuntaskan narkoba di Kabupaten Pasuruan. Meski begitu, masih saja ditemukan masyarakat yang tersangkut narkoba<sup>2</sup>.

Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh berita tentang anak-anak yang mabuk, berhalusinasi, bahkan tewas karena tidak sengaja mengonsumsi pil PCC (*Paracetamol, Caffeine, dan Corisoprodol*). "Ini sungguh memprihatinkan. Karena mereka adalah anak bangsa, masa depan negara ada di tangan mereka, maka ini menjadi PR kita bersama bagaimana mencegah anak-anak dari paparan narkoba. Ia mengatakan narkoba yang terus menghantui anak-anak dan remaja harus diperangi sejak dini. Upaya preventif keluarga sebagai lingkungan terkecil dan terdekat dengan juga wajib dilakukan<sup>3</sup>.

Bukan hanya pemerintah saja yang harus bekerja untuk memberantas obat haram itu tetapi peran kita sebagai masyarakat juga sangatlah penting. masyarakat Indonesia hanyalah masyarakat yang tergiur mencoba barang haram tersebut tetapi akibatnya menimbulkan efek yang sangat fatal. Itulah diperlukannya pendidikan dan sosialisasi narkoba sejak dini. Peran orang tua juga sangatlah penting, mengingat banyaknya pengguna narkoba di Indonesia adalah kalangan pelajar. Kita sebagai generasi terpelajar penerus bangsa

---

<sup>2</sup><http://pasuruankab.go.id/berita-3452-terus-ajak-masyarakat-perangi-narkoba.html>

<sup>3</sup><https://news.okezone.com/read/2017/10/01/542/1786663/mensos-ingatkan-narkoba-incar-anak-anak-perkuat-ketahanan-keluarga>

harusnya tau akibat fatal dari barang haram tersebut bukan malah mencoba dan memakainya sehingga menimbulkan kecanduan<sup>4</sup>.

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiatrer dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, *cokein*, ganja dan *cocoin*, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia<sup>5</sup>.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Dengan seiring waktu BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang

---

<sup>4</sup>[www.kompasiana.com/karinaangelia/peran-pemerintah-dan-masyarakat-agar-indonesia-bebas-narkoba](http://www.kompasiana.com/karinaangelia/peran-pemerintah-dan-masyarakat-agar-indonesia-bebas-narkoba)

<sup>5</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 30

Badan Narkotika Nasional, BKNN digantikan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Untuk itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai perubahan atas UU No. 22 Tahun 1997<sup>6</sup>.

Tindakan pencegahan merupakan salah satu upaya penting dalam pengurangan resiko hasil inovasi bidang narkoba bagi masyarakat. Secara konseptual, pencegahan merupakan suatu upaya untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki. Dari ketentuan hukum yang terkait dengan narkoba yang ada, aktor utama dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pada prinsipnya terdiri dari 3 kelompok, yakni pemerintah (*public sector*); lembaga usaha (*Privat sector*), dan masyarakat (*collective action sector*).

Dalam peraturan ini, masyarakat mempunyai posisi strategis dan berpotensi besar dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Peran serta masyarakat sebagaimana termaktub dalam UU No 35/2009 Pasal 104, Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

---

<sup>6</sup>Ar.Sujono dan Bony Daniel, 2013. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 34 - 35

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Pasal 105 Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan pasal 107, Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ketentuan hukum ini mengisyaratkan, bahwa masyarakat turut bertanggung jawab dalam pencapaian keberhasilan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika<sup>7</sup>.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Sosiologis Peran Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Penanggulangan Narkotika Berdasarkan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Desa Lekok Kabupaten Pasuruan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat Desa Lekok Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi peredaran narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>7</sup>Gunawan Antiprawiro, 2014. *Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika*. Jurnal ISSN 1410-3745, Volume 15 No 2, Juli – Desember 2014, hal 142

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah dan masyarakat Desa Lekok Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi peredaran narkoba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait penanggulangan Narkoba Berdasarkan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wacana baru sekaligus menambah wawasan yang lebih mendalam tentang penanggulangan narkoba di Desa Lekok Kabupaten Pasuruan berdasarkan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **E.1 Metode Pendekatan**

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah permasalahan mengenai peran pemerintah dan masyarakat terhadap penanggulangan narkoba di Desa Lekok Kabupaten Pasuruan yang

dikorelasikan dengan bahan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

## **E.2 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Desa Lekok Kabupaten Pasuruan. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini di antaranya adalah: lebih dekat dengan tempat tinggal peneliti, mudah dijangkau dan ekonomis, selain itu juga karena banyaknya kasus penyalahgunaan peredaran narkoba di Kabupaten Pasuruan terutama di desa Lekok sehingga peneliti ingin menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **E.3 Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama artinya populasi dan sampel penelitian langsung memberikan data tentang keadaan dirinya<sup>9</sup>. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak BNN Kabupaten Pasuruan terkait dengan penanggulangan peredaran narkoba di desa Lekok Kabupaten Pasuruan.

### **b. Data Sekunder**

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekamto.1998. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali pers Jakarta,hlm 33

<sup>9</sup> Endang Poerwanti, 1998, *Dimensi-dimensi riset ilmiah*, Pusat Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, hal 119



Adalah data yang mendukung data primer yang bermanfaat bagi pembahasan hasil penelitian yang terkait dengan hasil yang diteliti, misalnya tentang gambaran umum Desa Lekok Kabupaten Pasuruan, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dua pihak yang bukan peneliti sendiri.<sup>10</sup> Seperti halnya Peraturan Perundang-Undangan, literatur hukum, jurnal, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan topik penelitian.

#### **E.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mengambil data tentang penanggulangan peredaran narkoba di desa Lekok Kabupaten Pasuruan yang dilakukan dengan pihak pemerintah dan juga masyarakat. Wawancara dengan pemerintah dalam hal ini dilakukan dengan pihak BNN Kabupaten Pasuruan yaitu Kabag Humas, Kabag Pemberantasan, Kabag Administrasi, Kabag Pencegahan dan Pemberdayaan, serta Subbag perencanaan, serta kepada masyarakat.

b. Observasi

---

<sup>10</sup>Nazir, Moh.2005. *Metode Penelitian*. Cetakan keenam. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor. hal 87

Observasi yang dilakukan peneliti di desa Lekok Kabupaten Pasuruan ini dilakukan dengan mengamati kinerja pemerintah desa dan juga pihak BNN Kabupaten Pasuruan terutama dalam menangani masalah penanggulangan peredaran narkoba.

c. Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang bersifat teoritis dengan tujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan diperoleh data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. Data yang dimaksud adalah data tentang cara penanggulangan peredaran narkoba di desa Lekok Kabupaten Pasuruan.

d. Studi Internet

Studi internet yaitu cara pengambilan data yang dilakukan dengan mencari data melalui internet dalam proses pengumpulan data

e. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik.

### **E.5 Teknik Analisis Data**

Analisa data yang dilakukan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yang selanjutnya diambil kesimpulan yang relevan sehingga mendapatkan data yang akurat, dengan demikian untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan narkoba di desa

lekok kabupaten Pasuruan, kemudian faktor apa yang mendukung dan menghambat pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi narkoba di Kabupaten Pasuruan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan terdiri dari 4 Bab, yakni :

**Bab I : PENDAHULUAN**

Pada bab I ini berisi latar belakang yang menjadi dasar atau alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II penulis menguraikan mengenai kajian pustaka dan teori yang berkaitan penanggulangan tindak pidana narkoba.

**Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab III penulis akan menjelaskan tahapan penyelesaian dari permasalahan yang muncul, dalam hal ini disajikan pembahasan mengenai jawaban atas perumusan masalah yang diungkapkan.

**Bab IV : PENUTUP**

Dalam Bab IV berisikan kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan serta saran-saran yang disampaikan oleh peneliti.